

**KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
JAKARTA TIMUR
(Studi Analisis Putusan Nomor: 1528/Pdt.G/2017/PAJT)**

Fahmi Azis

Abstrak

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan manusia yang secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk baru perbuatan hukum. Kegiatan melalui media sistem elektronik, juga dikenal sebagai dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitasnya perceraian melalui media sosial (elektronik) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, untuk menganalisisnya pertimbangan hukum hakim terhadap alat bukti media sosial dalam perkara perceraian dalam Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PAJT dan untuk menentukan sah tidaknya perceraian tersebut. melalui media social (elektronik) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan normative penelitian hukum, yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan secara seksama berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan Studi Literatur Penelusuran Informasi dan data yang dibutuhkan di beberapa sumber. Persiapan dengan menggunakan studi literatur dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis literatur atau buku dan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Data deduktif Analisis adalah prosedur yang diawali dengan suatu peristiwa umum yang diketahui atau diyakini kebenarannya. dan diakhiri dengan kesimpulan. Menurut hukum Islam, perceraian dilakukan melalui media online seperti telepon, Facebook, Youtube, SMS, Whatsapp, atau Instagram, baik itu hanya dalam bentuk suara atau disertai bentuk pihak yang berkomunikasi berupa gambar (video panggilan). Kemudian menurut syariat, talak tersebut dinyatakan talak yang sah, meskipun ada tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung di depan istri. Menurut hukum positif, itu di sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur tentang perceraian yaitu pengaturan dalam KHI berasal dari hukum Islam. Namun, tidak adanya legalitas berupa surat cerai (dengan no cerai yang dijatuhkan di pengadilan), yaitu melalui media online memang akan berdampak pada masalah status perkawinan dan masalah hukum lainnya yang mungkin timbul sehingga umat Islam juga perlu mematuhi hukum negara.

Kata Kunci : Dokumen Elektronik, Bukti, Perceraian.

VALIDITY OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS A TOOL OF EVIDENCE IN DIVORCE DECISIONS AT EAST JAKARTA RELIGIOUS COURT

Fahmi Azis

Abstract

The rapid development and advancement of information technology has led to changes in human life which directly affect the birth of new forms of legal action. Activities through the media of electronic systems, also known as cyberspace. This study aims to determine the validity of divorce through social media (electronic) in divorce cases in the Religious Courts, to analyze the judge's legal considerations on social media evidence in divorce cases in Decision Number 1528/Pdt.G/2017/PAJT and to determine the validity of the divorce. through social media (electronic) in the perspective of Islamic law and legislation in Indonesia. This study uses normative legal research, namely by studying the literature, laws and regulations, and writings that are closely related to the problem under study. This research uses the Information Search Literature Study and the data needed in several sources. Preparation using literature study is done by reading, studying and analyzing literature or books and other sources related to the research theme. Deductive data analysis is a procedure that begins with a general event, the truth of which is known or believed, and ends at a conclusion. According to Islamic law, divorce is through online media such as telephone, Facebook, Youtube, SMS, Whatsapp, or Instagram, whether it is only in the form of sound or accompanied by the form of the party communicating in the form of an image (video call). Then according to the Shari'a, the divorce is declared as a valid divorce, even though there is no guardian and it is not delivered directly in front of the wife. According to positive law, it is in line with the provisions in Islamic law which regulates divorce, namely the arrangement in KHI comes from Islamic law. However, the absence of legality in the form of proof of divorce (with no divorce being handed down in court), namely through online media will indeed have an impact on marital status problems and other legal problems that may arise so that Muslims also need to comply with state law..

Keywords : : Electronic Documents; Evidence; Divorce.